

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep negara menurut Al Farabi

Gagasan besar al-Farabi dalam pemikiran politiknya, seperti yang ditulisnya dalam Ara'Ahli al-Madinah al Fadhilah, adalah Pembentukan negara besar berarti setiap warga negara memahami penyebab utamanya dan karakteristik nasional dari semua penyebab. Artinya warga negara harus mematuhi keesaan pencipta, Allah, dan segala bentuk materi menjadi terkait dengan pikiran positif, hal-hal surgawi dan Hambatan untuk menjalin hubungan dengan semua atributnya digambarkan sebagai wahyu yang harus diamati, objek dan objek yang mendasarinya (seperti urusan dunia) menopang kehidupan (seperti membuat atau menciptakan) dan bagaimana hal-hal muncul, dan kemudian runtuh.

Oleh karena itu, menurut Farabi, Farabi membentuk pemimpin yang imparsial dengan membentuk pemerintahan atau kota besar yang sempurna (madinah al-fadhilah). Menurutny, standar pemimpin yang adil adalah seseorang yang dapat menjalin kontak dengan pikiran aktifnya (aql al-fa'al), yang berilmu dan memiliki kemampuan kepemimpinan.

## 2. Konsep negara menurut Al Mawardi

Dalam mendefinisikan negara Al Mawardi berpendapat bahwa negara ialah sebuah jalan atau alat pelantara dan sarana untuk memelihara dan menciptakan kesejahteraan atau kemaslahatan, dikarenakan islam sudah mendarah daging atau masuk kepada sendi sendi kehidupan termasuk ideologi politik dalam kerangka yang lebih konkrit. Dan ini membuktikan bahwa islam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelenggarakan sebuah negara yang berdasarkan hukum-hukum Islam, dengan begitu membuktikan bahwa Islam merupakan suatu sistem bagi negara dan pemerintahan, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.

Ciri khas pada konsep negara Al-Mawardi yaitu memberikan evolusi ketimbang revolusi, jadi menurutnya lebih baik memperbaiki yang ada ketimbang mengganti sebuah tatanan negara yang sudah jadi, seperti terlihat pada kontrak sosialnya di kelembagaan dan pengangkatan imam yang syarat-syaratnya ada sebagian yang di pertahankan ada sebagian yang di tambahkan supaya lebih baik.

## 3. Persamaan Konsep Negara Al Farabi dan Al Mawardi

Al-Farabi dan Al Mawardi memiliki tujuan yang sama yaitu mendirikan negara, yaitu mencapai kebahagiaan (al-Sa'adah). Melalui kerjasama antar warga, maka kebahagiaan material dan

spiritual akan tercipta. Konsep pembangunan bangsa Al-Farabi dan Al Mawardi didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah.

#### 4. Perbedaan konsep negara Al Farabi dan Al Farabi

Menurut Farabi, keadaan Negara utama digambarkan sebagai tubuh manusia yang sempurna dan sehat. Berbagai organ tubuh bekerja sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di dalam tubuh manusia, organ terpenting adalah jantung. Lanjutnya Al-Farabi mengatakan, koordinator lembaga lain, membandingkan jantung dengan pemimpin di negara besar.

Al Mawardi lebih menitik beratkan soal kepala negara kemudian rakyat dan konstitusi atau lembaga-lembaga yang mengatur untuk membantu pemimpin atau imam seperti pengangkatan wazir atau menteri tanfdzi dll sehingga dapat melayani rakyat dengan baik tidak harus semuanya diurus oleh imam. Sebab, menurutnya, rakyat adalah cerminan kesejahteraan negara.

Adapun menurut Al Farabi konsep negaranya lebih ke ideologi sebuah negara bukan tentang kelembagaan seperti Al Mawardi di atas. Tetapi kedua nya menyelaraskan antara agama dan urusan dunia, dan keduanya menjadikan agama sebagai fondasi dalam menjalankan sebuah negara. Pemimpin negara besar memainkan peran penting dalam mencapai tujuan negara besar, kebahagiaan dunia ini dan seterusnya. Oleh karena itu pemimpin bangsa besar haruslah berasal dari filsuf profetik (filsuf nabi).

Al-Farabi (Al-Farabi) memberikan 12 standar yang disebut "imam", yaitu: anggota badan yang sempurna, pemahaman dan deskripsi yang baik, kemampuan memori yang kuat, kecerdasan dan bakat, kemampuan retorika yang baik, benar Kecintaan pada ilmu dan semua konsumsi melalui kebaikan berarti-kejujuran. , Jiwa pemberani, perlakukan segala sesuatu di dunia ini sebagai hal yang sepele, cintai keadilan, dan miliki kemauan yang kuat untuk melakukan hal yang benar.

Jika tidak ada yang memenuhi dua belas kualitas mulia, Al-Farabi menawarkan opsi kedua. Yaitu: arif, mudah dipahami dan mampu menegakkan hukum, memiliki kearifan menarik kesimpulan, memiliki pandangan ke depan, dapat memberi nasehat, dan sehat.

Sedangkan Al Mawardi dalam membicarakan pemimpin atau imammah dibagi menjadi dua yaitu dewan pemilih dan dewan imammah dimana keduanya memiliki kriteria-kriteria yaitu dewan pemilih pertama, adil dengan segala syarat-syaratnya, kedua memiliki ilmu yang membuatnya mengetahui siapa yang berhak menjadi imammah atau pemimpin ketiga memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang tepat dijadikan pemimpin.

Adapun standar komite imamat, yang pertama adalah keadilan dalam kondisi umum, yang kedua adalah memungkinkannya melaksanakan kitab suci sesuai dengan kasus

dan hukum, yang ketiga adalah merasa sehat, yang melaluinya dapat langsung menangani masalah yang diketahui, dan yang keempat adalah organ sehat fisik. Satu cacat mencegahnya untuk mengambil tindakan dengan sempurna dan cepat; wawasan yang memungkinkannya untuk memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan; ksatria berbakat membuat mereka aman dari bangsa lain; harus dari keturunan atau nasab dari qurasyi

Dalam kitab *Ara Ahl Madînahal-Fâdlilah*, Al-Farabi membagi negara menurut ideologi warganya. Ideologi warga negara utama memiliki prinsip yang benar, yaitu prinsip kebajikan. Pada saat yang sama, ideologi lawan utama negara-negara besar memiliki prinsip yang salah, yaitu prinsip mengutamakan kenikmatan dunia. Negara yang menentang negara besar, seperti negara bodoh (*al-Madînahal-Jâhiliyyah*), negara fasis (*al-Madînah Fâsiqah*), bidah (*al-Madînahal-Dhalâlah*) dan negara-negara yang berpindah (*al-Madînahal-Mutabaddilah*).

Adapun, definisi menurut Al-Mawardi tentang negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara manfaat. Karena Islam telah menjadi ideologi politik masyarakat dalam kerangka yang lebih spesifik, Islam memerintahkan umat Islam untuk mematuhi negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, kriminal dan sipil diatur

dengan jelas oleh Islam. Ini membuktikan bahwa Islam adalah sistem negara dan pemerintahan

Adanya masalah universal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bekerja sama dan saling membantu. Bagi Al-Mawardi, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lemah, yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling menolong, serta menjadikan manusia tidak lagi sombong, dan diatur. Masyarakat,

Dalam pengelolaan nasional, Al-Mawardi mengedepankan pendekatan kelembagaan, yang dicapai dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memperkuat struktur nasional. Pembagian lembaga negara secara sistematis oleh Al-Mawardi perlu dipahami agar Khilafah menjadi lembaga tertinggi dalam negara, meskipun tidak serta merta memiliki kewenangan, karena dalam kerangka nilai-nilai agama, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. . Tapi pada titik tertentu, institusi tertinggi bisa diambil alih oleh Ahl wal aqd

## **B. Saran**

Setelah penulis menyelesaikan tulisan skripsi diatas pada dasarnya semua manusia mempunyai kekurangan oleh karena bagi para pembaca jika Dalam tulisan ini terdapat kekurangan atau salah berpendapat dimohon dengan besar hati agar mengkritisi tulisan ini dengan bijak